

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abidin, Mohammad Zainul, 2009, *Pemberian Janiman Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara Ditinjau Dari Hukum Jaminan Indonesia*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Assidiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- _____, 2006, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- _____, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013, *Pengelolaan BUMD berdasarkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, 2017, *Buku Kinerja PDAM 2017*, Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, Jakarta
- Budiarjo, Miriam, 2015, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi Cetakan Kelima*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fauzan, Muhammad, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keunagan antara Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Hadisoeparto, Hartono, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M., et. all., 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, 2009, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hamidi, Jazim, 1999, *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Handoyo, Hestu Cipto, 1998, *Otonomi Daerah Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah, Pokok-Pokok Pikiran Menuju Reformasi Hukum DI Bidang Pemerintahan Daerah*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Hariwijaya, 2007, *Metodologi dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Untuk Ilmu Sosial dan Humaniora*, Dua Satria Offset, Yogyakarta.

- Huda, Ni'matul, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- Ibrahim, Johanes, 2006, *Hukum Organisasi-Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, Refika Aditama, Bandung .
- Ilmar, Aminuddin, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Grup, Jakarta.
- J. Satrio, 2003, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi Penanggungan (Borgtocht) dan Perikatan Tanggung Menanggung*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 169-172
- Latif, Yudi, 2012, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Manan, Bagir, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- _____, 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mustofa, Bachsan, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta
- Mertokusomo, Sudikno, 2005, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Puspitasari, Riskha Dwi Puspitasari, 2009, *Penjaminan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kupedes Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Kawi-Malang*, Skripsi, Strata I Ilmu Hukum FH UGM, Yogyakarta.
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Saidi, Muhammad Djafar, 2011, *Hukum Keuangan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sarundajang, 2002, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sibuea, Hotma P., 2010, *Asas-Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

- Soekanto, Sorjono dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Ketujuh Belas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 2011, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta
- Subagio, M., 1988, *Hukum Keuangan Negara RI*, Rajawali Press, Jakarta.
- Subekti, 1991, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Adi Bakti, Bandung.
- Sumardjono, Maria S.W., 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tjandra, W. Riawan, 2009, *Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintah Yang Bersih Dan Berwibawa*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Yani, Ahmad, 2002, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, Rajawali press, Jakarta.
- World Health Organization, 2003, *The Right To Water*, World Health Organization, Prancis.

B. JURNAL

- Bluemel, Erik B., 2004, *The Implications of Formulating A Human Right to Water*, 31 Ecology Law Quarterly 957, University of California
- Hardberger, Amy, 2006, *Whose Job Is It Anyway?: Governmental Obligations Created by the Human Right to Water*, Texas International Journal Vol. 41.
- Fuadi, Ariza, 2015, *Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam Dan Kapitalisme*, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Volume V, No. 1, Juni 2015, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Universitas Alma Ata, Yogyakarta.
- Maisaroh, Siti, Sumartono, dan Sujarwoto, 2015, *Lelang Jabatan Kepala Sekolah Dan Kualitas Layanan Pendidikan (Studi Kasus pada 2 Sekolah Menengah Atas Negeri di Jakarta Selatan)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 11, Universitas Brawijaya, Malang
- Radburch, Gustav Radburch, 2006, *Five Minutes of Legal Philosophy (1945)*, diterjemahkan dalam Bahasa Inggris oleh Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 26, No. 1 (2006).
- Satyanegara, Ery, 2013, *Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantif)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.4 Oktober-Desember 2013, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Scanlon. John, et.al., 2004, *Water as Human Right?*, Cambridge, IUCN.

Widjayanto, Agus, 2005, *Dana Pensiuan : Status Badan Hukum dan Asas-asas Penyelenggaraannya*, Yuridika, Vol. 20 No. 4, Juli-Agustus 2005, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173)

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.011/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/Pmk.01/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri,

Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada
Perusahaan Daerah Air Minum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan
Penetapan Tarif Air Minum.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2017 tentang Tata Cara
Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan
Dana Alokasi Umum Dan/ Atau Dana Bagi Hasil

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

D. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 001-021-022/PUU-
I/2003

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 77/PUU-IX/2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XI/2013

E. WEBSITE

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id>, dikunjungi pada tanggal 10 Mei 2015

Bank Indonesia, *BI Rate*, <http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-rate/data/Default.aspx>, dikunjungi pada tanggal 27 Januari 2018

Kusuma, Hendra, *Utang Pemerintah Nyaris Rp 4.000 Triliun, Ini Rinciannya*,
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3817082/utang-pemerintah-nyaris-rp-4000-triliun-ini-rinciannya>, 16 Januari 2018,
dikunjungi pada tanggal 2 Juni 2018

Laucereno, Sylke Febrina, *Ini Daftar Bunga Kredit Bank di RI, Rata-rata di Atas 10%*,
<https://finance.detik.com/moneter/3657315/ini-daftar-bunga-kredit-bank-di-ri-rata-rata-di-atas-10>, 15 September 2017, dikunjungi pada tanggal 27 Januari 2018

Mustami, Adinda Ade, *Ini pemda yang hobi mengendapkan dana di bank*,
<http://nasional.kontan.co.id/news/ini-pemda-yang-dananya-paling-mengendap-di-bank>, 24 Oktober 2017, dikunjungi pada tanggal 3 Juni 2018

Pujiastuti, Indah, *Ratusan PDAM Merugi, ini Solusi Rizal Ramli*,
<http://www.beritasatu.com/ekonomi/342512-ratusan-pdam-merugi-ini-solusi-rizal-ramli.html>, 19 Januari 2016, dikunjungi pada tanggal 4 Juni 2016

United Nation, *2010 Summit on the Millennium Development Goals*,
<http://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml>, dikunjungi pada tanggal 13 September 2017

F. WAWANCARA

Wawancara dengan Agus Pranoto, Kepala Seksi Pengembangan Investasi Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah, Subdirektorat Investasi Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah, Direktorat SMI, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, NIP 197909072001121003, pada tanggal 27 Maret 2018, di Jakarta

Wawancara dengan Ervia Yulanda, Staf pada Subdirektorat Sistem Pengembangan Air Minum Khusus, Direktorat Sistem Pengembangan Sistem Penyediaan Air, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, NIP 198406262010122004, pada tanggal 28 Maret 2018, di Jakarta

Wawancara dengan Galuh Kusumastuti, Plt. Kepala Sub Bidang Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air, Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, NIP 198308062915022002, jawaban atas pertanyaan disampaikan pada tanggal 2 Mei 2018 melalui surat elektronik (email)

Wawancara dengan Jamiat Aries Calfat, Kasubdit Perumusan Kebijakan Non Dana Perimbangan, Perimbangan, Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, NIP 197004031997031002, jawaban atas pertanyaan disampaikan pada tanggal 20 April 2018 melalui surat elektronik (email)

Wawancara dengan Irsad Zeily, Kepala Seksi Peraturan dan Perjanjian Subdit Perencanaan dan Analisis Kewajiban Kontinjensi, Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan, NIP 197209051999031002, pada tanggal 27 Maret 2018, di Jakarta

Wawancara dengan Kabul Wijayanto, Kepala Subdirektorat Investasi Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah, Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, NIP 197103251996031001, pada tanggal 27 Maret 2018, di Jakarta

Wawancara dengan M. Faisal Fahmi, Kasi Perumusan Kebijakan Pembiayaan Hibah dan Dana Darurat, Subdirektorat Perumusan Kebijakan Non Dana Perimbangan, Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, NIP 197512032002121002, pada tanggal 2 April 2018, di Jakarta

Wawancara dengan Riris Prasetyo, Kepala Kepala Subdirektorat BUMD Air Minum, Limbah, dan Sanitasi, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, NIP 197506222003121001, pada tanggal 3 April 2018, di Jakarta